

DINAMIKA
KEBIJAKAN MADRASAH ALIYAH PROGRAM KEAGAMAAN
DAN IMPLIKASINYA DI MAN YOGYAKARTA I



Oleh:

Nurhadi Yasin, S.Pd.I.

NIM: 1420410152

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Pendidikan Islam
Konsentrasi Manajemen Dan Kebijakan Pendidikan Islam

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Nurhadi Yasin, S.Pd.I.**
NIM : 1420410152
Jenjang : Magister
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali, pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya.

Yogyakarta, 28 November 2016

Saya yang menyatakan,



Nurhadi Yasin, S.Pd.I.

NIM: 1420410152

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurhadi Yasin, S.Pd.I.**
NIM : 1420410152
Jenjang : Magister
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2016

Saya yang menyatakan,



Nurhadi Yasin, S.Pd.I.

NIM: 1420410152



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : KEBIJAKAN MADRASAH ALIYAH PROGRAM KEAGAMAAN
DAN IMPLIKASINYA DI MAN YOGYAKARTA I
Nama : Nurhadi Yasin, S.Pd.I.
NIM : 1420410152
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi : Manajemen dan kebijakan Pendidikan Islam
Tanggal Ujian : 13 Januari 2017
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

Yogyakarta, 08 Februari 2017
Direktur,

Prof. Nurchandi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : **Dinamika Kebijakan Madrasah Aliyah Program
Keagamaan dan Implikasinya di MAN Yogyakarta I.**

Nama : **Nurhadi Yasin, S.Pd.I.**

NIM : **1420410152**

Program Studi : **Pendidikan Islam**

Konsentrasi : **Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam**

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua : **Dr. Sunarwoto, M. A** ()

Pembimbing/ Penguji : **Prof. Dr. H. Nizar Ali, M. A** ()

Penguji : **Dr. Hj. Marhumah, M. Pd** ()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal, 13 Januari 2017

Waktu : **09.00 s.d 10.00**

Hasil/ Nilai : **86/A-**

IPK : **3,69**

Predikat : **Sangat Memuaskan**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

DINAMIKA KEBIJAKAN MADRASAH ALIYAH PROGRAM KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA DI MAN YOGYAKARTA I

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurhadi Yasin, S. Pd. I
Nim : 1420410152
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana uin sunan kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar magister pendidikan Islam (M.Pd).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 November 2016

Pembimbing



Prof. Dr. H. Nizar Ali, M. Ag.

NIP:19640321 1992031 003

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس (إمام الطبراني)*

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”



*Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Hadits Shahih Jilid II*. Terj. M. Qodirun Nur, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1996), hlm. 320

ABSTRAK

Nurhadi yasin, S.Pd.I., 2016. *Dinamika Kebijakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan dan Implikasinya di MAN Yogyakarta I.* Tesis. Program Studi Pendidikan Islam, Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Madrasah merupakan lembaga keagamaan warisan dari peradaban Islam yang mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanannya. Hingga di Indonesia madrasah mengalami lima dengan menjadi sekolah yang berciri khas agama Islam. Walaupun mengalami perubahan sedemikian namun nilai keagamaan masih tetap dipertahankan bahkan dijadikan salah satu program keagamaan dalam madrasah. Menjadinya salah satu program keagamaan dalam madrasah, nampaknya tidak mudah, bahkan sempat mengalami beberapa kali perubahan kebijakan yang menuntut adanya beberapa perubahan. Dalam hal ini, yang menjadi acuan adalah kebijakan madrasah keagamaan. Dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui kebijakan terkait perubahan kebijakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK). (2) Untuk mengetahui dinamika kebijakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK). (3) Untuk mengetahui implikasi dinamika program keagamaan di MAN I Yogyakarta.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kebijakan (*policy research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam analisis data, data yang dikumpulkan terlebih dahulu adalah data observasi, data wawancara, dan data dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dirangkum dan disusun sehingga dapat lebih mudah dipahami serta dapat ditarik kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu menguji valid tidaknya data melalui pengecekan data, baik satu jenis data atau berbeda jenis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa : (1) kebijakan yang terkait dengan Madrasah Aliyah Program Keagamaan yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, keputusan menteri agama, peraturan menteri agama, dan keputusan bersama. (2) dinamika kebijakan madrasah aliyah program keagamaan bermula dari pilot proyek dari menteri Munawir Sadzali dengan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Program Studi Agama, dan Program Ilmu-Ilmu Keagamaan. (3) Implikasi dinamika kebijakan madrasah aliyah program keagamaan di MAN Yogyakarta I, berdampak pada kualitas input (siswa) yang menurun sehingga kualitas siswa juga menurun, berlanjut pada nilai-nilai pembelajaran siswa yang juga menurun, dan berakibat pula menurunnya peminat peserta didik untuk masuk ke program keagamaan.

Kata Kunci: **kebijakan pendidikan Islam, madrasah aliyah program keagamaan,**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta‘addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----	Fatḥah	ditulis	<i>A</i>
-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fatḥah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>kaīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>funūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūṣ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ .

Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Dinamika Kebijakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan dan Implikasinya di Man Yogyakarta I”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, keluarga, para shabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini sangat memberikan pengalaman baru dan dengan penuh perjuangan yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan pernah terwujud dan berhasil dengan maksimal tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Arahan, bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan merupakan sebuah hadiah yang sangat penting dan berharga bagi penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A.,M.Phil.,Ph.D., selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Ro'fah, BSW., MSW.,Ph.D., selaku koordinator Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Roma Ulin Nuha, M.Hum. selaku sekretaris Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M. Ag.selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen dan pegawai Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada dosen-dosen yang telah mengampu matakuliah pada konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam. Terimakasih banyak atas segala curahan ilmu pengetahuan, motivasi, inspirasi sehingga penulis memiliki pandangan berpikir yang baru yang belum pernah diperoleh oleh penulis sebelumnya.
7. Pegawai perpustakaan pusat dan perpustakaan PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dalam menyediakan literatur dan buku-buku penunjang lainnya.
8. Segenap pihak sekolah khususnya kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di MAN Yogyakarta I.
9. Ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil dengan penuh kesabaran, penuh cinta, dan kasihnya kepada penulis,

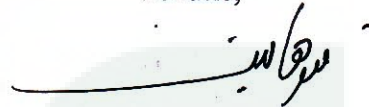
dan kepada kakak dan adik-adikku tersayang yang selalu mendoakanku sehingga penulis dapat menyelesaikan studi jenjang Magister (S2).

10. Teman-teman kelas MKPI Reguler angkatan 2014 yang telah banyak memberikan pengalaman baru dan motivasi selama mengenyam pendidikan sehingga tesis ini terselesaikan, dan;

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini masih membutuhkan perbaikan untuk kedepannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif menjadi hal yang sangat penulis butuhkan. Akhirnya peneliti berharap agar tesis ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan dan bagi perkembangan keilmuan selanjutnya.

Yogyakarta, 28 November 2016

Penulis,



Nurhadi Yasin, M.Pd.I
NIM. 1420410152

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I :PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	29
 BAB II:KEBIJAKAN-KEBIJAKAN MADRASAH ALIYAH PROGRAM	
KEAGAMAAN	31
A. Madrasah Aliyah Program Keagamaan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950	33
1. Lahirnya Dikotomi Pendidikan	33
2. Integrasi Pendidikan Islam Di Sekolah.....	35
3. Pengakuan Lembaga Pendidikan Islam Sebelum UU No. 4 Tahun 1950	37

3. Pengakuan Lembaga Pendidikan Islam Sebelum UU No. 4 Tahun 1950.....	37
4. Madrasah Wajib Belajar.....	38
5. Penyetaraan Madrasah	39
6. Lahirnya Madrasah Aliyah Program Keagamaan.....	43
B. Madrasah Aliyah Program Keagamaan dalam UU No. 2 Tahun 1989.....	45
1. Pengelolaan Pendidikan Menengah	47
2. Lahirnya Madrasah Aliyah Keagamaan.....	49
C. Madrasah Aliyah Program Keagamaan dalam UU No 20 Tahun 2003.....	51
1. Pengukuhan Madrasah	51
2. Integrasi Madrasah Keagamaan.....	54

BAB III: DINAMIKA KEBIJAKAN MADRASAH ALIYAH PROGRAM

KEAGAMAAN	58
A. Dinamika Kebijakan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK)	58
1. Latar Belakang Berdirinya Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK)	58
2. Kebijakan Kaum Elit.....	62
3. Implementasi kebijakan MAPK	66
B. Dinamika Kebijakan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)	72
1. Praktisi Kebijakan.....	72
2. Implementasi kebijakan MAK.....	79
3. Degradasi kebijakan Madrasah Aliyah Keagamaan	84
C. Dinamika Madrasah Aliyah Program Keagamaan	89
1. Integrasi Program Keagamaan.....	89
2. Kurikulum Program Keagamaan	91
3. Implementasi Program Keagamaan	96
D. Kebijakan Madrasah Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan	99

BAB IV :IMPLIKASI DINAMIKA KEBIJAKAN MADRASAH ALIYAH PROGAM KEAGAMAAN DI MAN YOGYAKARTA 1	110
A. Implikasi Dinamika kebijakan Madrasah Aliyah Program	
Keagamaan	110
1. Kelembagaan	110
2. Peserta Didik	114
a. Peserta Didik MAPK.....	114
b. Peserta Didik Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)....	117
c. Peserta Didik Program Studi Agama.....	119
d. Peserta Didik Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan.....	122
3. Pendidik.....	124
a. PendidikMadrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) ..	124
b. Pendidik Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).....	126
c. Pendidik Program Ilmu Agama dan Ilmu-Ilmu Keagamaan.....	128
4. Kurikulum	129
5. Sarana Prasarana	131
a. Asrama.....	132
b. Kelas	133
c. Buku Pelajaran	133
BAB V: PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	:Mata Pelajaran Madrasah Aliyah Program Khusus
Tabel 2	:Pelajaran Madrasah Aliyah Keagamaan Kelas I dan II
Tabel 3	:Pelajaran Khusus, Program Ilmu-Ilmu Agama
Table 4	:Pelajaran Khusus: Program Keterampilan
Table 5	:Struktur Kurikulum Program Keagamaan dari Permendikbud
Table 6	:Struktur Kurikulum Program Keagamaan dari Menteri Agama
Table 7	:Struktur Kurikulum Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan
Table 8	:Daftar Peserta Didik
Gambar 1	:Pengakuan Madrasah
Gambar 2	:Reposisi Madrasah Aliyah Program Khusus
Gambar 3	:Pelatihan Guru

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Riwayat Hidup
- Lampiran 1 : Ketersediaan Menjadi Pembimbing Tesis
- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 1 : Struktur Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang muncul sejak masa klasik Islam,¹ dan sekaligus menjadi formulasi tradisi pendidikan yang sudah berlangsung di Masjid dan *Kuttab*.² Di dalam madrasah terdapat *tafaqquh fi ad-din* (mempelajari ilmu agama) menjadi komponen penting, sehingga melestarikan keberadaan madrasah mengandung makna memelihara komponen *tafaqquh fi al-din* tersebut.³ Keberadaan madrasah menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan pendidikan Islam, khususnya dalam lingkungan madrasah dikalangan umat Islam itu sendiri.

Kelahiran Madrasah di Timur Tengah didasari oleh motivasi agama, motivasi ekonomi, ketenagakerjaan dan didasari oleh motivasi politik. Dengan lahirnya Madrasah, pendidikan Islam memasuki preode baru yaitu pendidikan berfungsi untuk kemajuan Negara, dan sekolah-sekolah dilembagakan untuk tujuan pendidikan sektarian dan indoktrinasi politik.⁴ Kemudian penguasa-penguasa muslim di Timur Tengah banyak mendirikan madrasah-madrasah

¹Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antar Modernisasi Dan Identitas*, (Jakarta: Uin Jakarta Press, 2009), hlm. 8

²*Kutab* berasal dari kata *takdib* yang berarti mengajar menulis, *kuttab* sendiri berarti menulis. *Ibid.*, hlm. 32

³*Ibid.*, hlm. 58

⁴Maksum, *Madrasah, Sejarah Dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 63.

mereka sendiri.⁵ Madrasah-madrasah ini berfungsi tidak hanya sebagai institusi bagi transmisi ilmu, juga sebagai *locus* utama produksi ulama.⁶

Sementara itu, perkembangan madrasah di Indonesia pada awalnya merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan pesantren.⁷ Seiring dengan perkembangan sistem pendidikan, madrasah juga diperbarui sistemnya dengan mengkolaborasikan antara pendidikan agama (Islam) dengan pendidikan umum (sekolah).⁸ Pembaruan pendidikan Madrasah terpicu oleh semangat Pan Islamisme dan gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah dan Mesir yang imbasnya merambah ketanah air melalui para pelajar yang telah selesai menyelesaikan studinya,⁹ dan kembali ke Indonesia untuk di adopsi.

⁵ Penguasa muslim yang mendirikan madrasah antara lain; Al-Azzawi mencatat bahwa pada masa Saljuk terdapat lebih dari tiga puluh madrasah yang didirikan, Ahmad Syalabi mencatat terdapat enam belas madrasah pada masa dinasti Ayyubiyun. Maksum, *Madrasah, Sejarah Dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 76. Nizam al-Mulk mendirikan madrasah-madrasah di Basrah dan Mosul (Irak), Isfahan, Nisyapur, Merv, Balkh, Heret (Iran), dan Afif 'Abd Allah Muhammad Al-Ursufi mendirikan madrasah Al-Ursufi. Azumradi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 62-63.

⁶ Azumradi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 62

⁷ Kelanjutan sistem pendidikan Pesantren yang di dalamnya terdapat unsure-unsur pokok dari suatu Pesantren. Unsure-unsur tersebut adalah kyai, santri, pondok, masjid, dan pengajaran mata pelajaran agama Islam. Sedangkan pada sistem Madrasah tidak harus ada pondok, masjid dan pengkajian kitab-kitab Islam kelasik. Unsure yang diutamakan di Madrasah adalah pimpinan, guru, siswa, perangkat keras, perangkat lunak, dan mata pelajaran agama Islam.

⁸ M. Ridlwan Nasir, *Mencari Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 90. Sejumlah lembaga pendidikan Islam (Pesantren) tidak melakukan perubahan, misalnya sejumlah lembaga pengajian Al-Qur'an yang sederhana serta sejumlah Pesantren tidak mengadakan perubahan sebelum 1945. Tetapi sebagian lembaga lainnya berkembang dengan mengubah metode, memasukkan klasikal, dengan tahun pelajaran yang teratur, mengubah isi pendidikan, memberikan pendidikan umum di samping agama yang merupakan bagian yang paling penting dalam kurikulumnya. Lembaga madrasah ini sudah memakai sistem kelas dengan pelajaran Al-Qur'an dan kitab, baik yang sudah menambahkan pelajaran umum maupun yang 100 persen agama. Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 87-88.

⁹ Para alumni yang kembali ke Indonesia membangkitkan gerakan pembaruan islam di Indonesia yang pada gilirannya gerakan tersebut juga memicu tumbuhnya gerakan pembaruan dibidang pendidikan islam. Di antaranya munculnya Madrasah Adabiyah di Padang, dan Madrasah Secoel di Batusangkar. Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi Dan Aksi*, (Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2004), hlm. 18.

Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, madrasah baru mengalami perubahan-perubahan signifikan, menyusul diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1975 yang dikenal dengan nama SKB Tiga Menteri. SKB Tiga Menteri tersebut berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan sekolah umum dengan mekatagorikan madrasah menjadi tiga tingkatan. Madrasah Ibtidaiyah (MI) disejajarkan dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Proporsi kurikulum dalam SKB 3 Menteri adalah 70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan Agama yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan, baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA).

Surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri dipandang sebagai wujud pengakuan yang lebih nyata terhadap Madrasah dan sekaligus merupakan langkah setrategis menuju integrasi Madrasah ke dalam sistem pendidikan Nasional yang tuntas. Dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tersebut, madrasah memperoleh definisi yang jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan Sekolah, sekalipun dalam penyelenggaraanya berada di bawah departemen Agama.¹⁰ Tetapi penyelenggaraan madrasah dengan pola Surat Keputusan

¹⁰ Maksum, *Madrasah...*, hlm. 150-151.

Bersama (SKB) Tiga Menteri, madrasah dipandang sudah seperti sekolah umum, yang berarti identitas madrasah semakin berkurang bahkan hilang.¹¹

Melihat pandangan tersebut, maka dicetuskan proyek rintisan untuk menyelenggarakan Madrasah Aliyah Program Kusus (MAPK) oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali pada tahun 1987, dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 73 tahun 1987.¹² Namun pada tahun 1993 oleh Menteri Tarmizi Taher Madrasah Aliyah Program Kusus (MAPK) dirubah namanya menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama No 173 Tahun 1993.¹³

Pendirian Madrasah Aliyah Program Kusus (MAPK) merupakan program intensifikasi pendidikan yang menerapkan sistem asrama (program tutorial) keagamaan dan pengembangan kemampuan Bahasa Arab dan Inggris.¹⁴ Namun pelaksanaannya, Madrasah Aliyah Program Keagamaan belum merupakan unit pelaksanaan teknis secara mandiri, sehingga susunan, tata kerja dan kegiatannya masih bergantung pada Madrasah Aliyah itu berada.¹⁵

Setelah Sembilan belas tahun berdiri dengan nama Madrasah Aliyah Program Kusus (MAPK) dan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), pada tahun 2006 program tersebut diberhentikan dengan keluarnya surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi pada poin 5 dinyatakan bahwa pada tahun pelajaran

¹¹ Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta, cv. Amissco, 1996), hlm. 120.

¹² Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama Dan Keagamaan Visi, Misi Dan Aksi*, (Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2000), hlm. 114-115.

¹³ Marwan Saridjo, *Bunga rampai pendidikan agama islam*, (Jakarta, cv. Amissco, 1996), hlm. 125.

¹⁴ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah Dan Pendidikan...*, hlm. 37

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 114.

2007/2008 Madrasah Aliyah penyelenggara Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) tidak diperkenankan menerima murid lagi. Sebagai gantinya Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) dirubah menjadi Program Keagamaan dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang pemberlakuanya dimulai tahun ajaran 2007/2008 tanggal 6 Mei 2008. Dengan mengacu setandar isi dan standar kelulusan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) nomor 22 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2008.

Kemudian, Tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa yaitu kurikulum 2013, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah yang diberi nama Program Studi Keagamaan. Didukung dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 912 Tahun 2013, tentang kurikulum madrasah 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab yang diberi nama Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan Madrasah Aliyah.

Perubahan kebijakan pemerintah pada madrasah aliyah program keagamaan memiliki dampak terhadap pengembangan madrasah, terutama di Yogyakarta, Padang Panjang, Jember, Ujung Pandang dan Ciamis. Dimana kota-kota ini merupakan kota yang menjadi rintisan pertama Madrasah Aliyah Program Kusus (MAPK), baik itu bersifat menguntungkan atau merugikan. Hal ini karena,

hakekatnya setiap kebijakan tidaklah netral dan terdapat keuntungan atau kerugian bagi kelompok tertentu.¹⁶

Yogyakarta merupakan salah satu kota pertama yang ditunjuk untuk menjalankan program keagamaan berdasarkan hasil dari studi kelayakan,¹⁷ tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Yogyakarta I. Sehingga Madrasah ini merupakan salah satu lembaga yang mendapatkan dampak dari kebijakan pemerintah terkait dengan Madrasah Aliyah Program Keagamaan.¹⁸ Sebagai lembaga pendidikan madrasah yang ditunjuk untuk menjalankan program khusus dari pemerintah. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Yogyakarta I sebagai lembaga pendidikan niscaya mengalami perubahan secara kesinambungan mulai dari awal dilaksanakannya program keagamaan hingga saat ini.

Berubahnya kebijakan pemerintah dalam tatanan Madrasah Aliyah pada Program Keagamaan dapat dilihat di MAN Yogyakarta I. Berawal dari Madrasah Aliyah Program Kusus (MAPK) pada tahun 1987, Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) pada tahun 1993, kemudian pada tahun 2008 MAK berubah menjadi Program Studi Agama, dan pada kurikulum 2013 berganti nama menjadi Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan (IIK). Disamping itu sejak tahun 2012 MAN

¹⁶ Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia; Peran Tokoh-Tokoh Islam Dalam Penyusunan UU NO 2/ 1989*, terj. Lilian D. Tedjasudhana, (Jakarta: INIS, 2004), hlm. 2

¹⁷Dari studi kelayakan ditetapkan untuk tahap pertama sebanyak lima madrasah aliyah negeri sebagai penyelenggara MAPK diantaranya: MAN Darussalam Ciamis Jawa Barat, MAN Ujung Pandang, Man 1 Yogyakarta, MAN Kota Baru Padang Panjang Sumatra Barat, MAN Jember Jawa Timur. Lihat. Hasbullah, *Kapeta Sleka Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 90. Sementara itu Abdul Rachman Saleh mengatakan bahwa pada tahun 1990/1997 MAPK diselenggarakan di 17 lokasi diantaranya: Ciamais, Yogyakarta, Jember, Padang Panjang, Ujung Pandang, Bandar Lampung, Martapura, Banda Aceh, Solo, Mataram, Palembang, dan Jombang. Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan...*, hlm. 142.

¹⁸ Hasil dari wawancara kepada ketua akademik bidang keagamaan MAN Yogyakarta 1. 5 Desember 2015.

Yogyakarta I menjadi salah satu rintisan madrasah unggulan berdasarkan SK Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana program studi Program Keagamaan atau Ilmu-Ilmu Keagamaan (IIK) menjadi program unggulan.¹⁹

Dengan berubah-ubahnya kebijakan program keagamaan pada madrasah aliyah dan untuk mencakup semua kebijakan-kebijakan sebagai mana di atas, penulis mengistilahkan objek penelitian menjadi “Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK)”. Dimana madrasah aliyah program keagamaan (MAPK) mencakup Madrasah Aliyah Program Kusus (MAPK), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Program Studi Agama, dan Program Ilmu-Ilmu Keagamaan (IIK).

Dengan demikian, MAN Yogyakarta I menarik untuk diteliti guna mengembangkan pendidikan Madrasah Aliyah Program Keagamaan menjadi lebih berkualitas. Dalam penelitian ini tema difokuskan pada “Dinamika Kebijakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan dan Implikasinya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Yogyakarta I”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kebijakan terkait perubahan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK).
2. Bagaimana dinamika kebijakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK).

¹⁹ Dapat dilihat pada brosur Program Studi Ilmu-Ilmu Keagamaan (IIK) MAN Yogyakarta 1.

3. Bagaimana implikasi dinamika Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) di MAN 1 Yogyakarta

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika kebijakan madrasah aliyah program keagamaan dan implikasi di MAN Yogyakarta I yang mencakup:

- a. Untuk mengetahui kebijakan terkait perubahan kebijakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK).
- b. Untuk mengetahui dinamika kebijakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK).
- c. Untuk mengetahui implikasi dinamika program keagamaan di MAN I Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian kebijakan madrasah aliyah program keagamaan dan implikasinya di MAN Yogyakarta I sebagaimana berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan khazanah keilmuan dan kontribusi ilmiah berupa dinamika kebijakan madrasah aliyah program keagamaan dan implikasinya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi lembaga yang diteliti, sebagai informasi penting dan pedoman dalam hal implementasi kebijakan madrasah aliyah

- program keagamaan untuk meningkatkan kualitas input dan output dan implikasinya di MAN Yogyakarta I.
- 2) Bagi akademis, memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademis yang mengadakan penelitian berikutnya baik meneruskan riset maupun mengadakan riset baru.
 - 3) Bagi peneliti, penelitian ini dapat berguna sebagai media untuk memperkaya wawasan keilmuan dan pengalaman tentang kebijakan pendidikan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang akan diteliti oleh penulis sebagai bahan acuan dan pertimbangan, diantaranya adalah:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Nur Aini dengan judul, “*Eksistensi MAPK dan Pengelolaannya Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Kasus di MAN 1 Surakarta)*”.²⁰

Masalah yang dikupas dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa alas pokok dipertahankannya MAPK di Man 1 Surakarta. 2) Bagaimana proses kegiatan pengelolaan atau manajemen perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan yang dilakukan oleh madrasah pada program MAPK dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran Bahasa Arab. 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan atau manajemen program MAPK terhadap upaya peningkatan mutu pembelajaran Bahasa Arab. Penelitian ini merupakan penelitian *fiel work*

²⁰ Nur Aini, *Eksistensi Mapk dan Pengelolaannya Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Kasus Di MAN 1 Surakarta)*, PPS UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2015).

research dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen sekolah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) alasan tetap dipertahankan MAPK di MAN 1 Surakarta yaitu karna melihat output yang dihasilkan telah banyak menoreh prestasi, kurikulum yang digunakan dinilai berhasil mencetak lulusan yang berprestasi, tujuan yang ingin dicapai merupakan wujud dari kebutuhan masyarakat akan pengetahuan agama, semangat dari guru, keberadaan asrama, dan kekuatan jaringan alumni MAPK untuk mendukung pelaksanaan program MAPK. (2) Upaya peningkatan mutu pembelajaran bahasa Arab dimulai dengan perencanaan yang diawali dengan penetapan tujuan pendidikan dan mendesain kurikulum. Pengorganisasian dibagi menjadi tiga yaitu kegiatan pembelajaran pagi, tutorial sore dan asrama serta kegiatan penunjang akademik dan pendampingan belajar. Kepemimpinan secara umum dipegang oleh kepala sekolah dan pimpinan dalam pembelajaran dipimpin oleh guru. Pengendalian dilakukan dengan mengadakan evaluasi hasil dari proses pembelajaran. Pada tesis ini berbeda dengan tesis yang akan diteliti oleh penulis, pada tesis yang akan di tulis penulis yaitu terkait dinamika kebijakan sedangkan pada tesis ini terkait dengan manajemen.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Asykar Nurul Hidayah, berjudul *“Manajemen Kurikulum Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Surakarta”*. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen dan teori yang digunakan adalah

teori manajemen pendidikan. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini: pertama, apa saja bentuk-bentuk manajemen yang masih dipertahankan di program keagamaan MAN 1 Surakarta dan mengapa manajemen tersebut masih dipertahankan. Kedua, bagaimana manajemen kurikulum program keagamaan MAN 1 Surakarta. Ketiga, bagaimana peran guru dalam manajemen kurikulum program keagamaan MAN 1 Surakarta. Keempat, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung berjalanya proses manajemen kurikulum program keagamaan MAN 1 Surakarta.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, ada tiga hal yang tetap dipertahankan dalam manajemen program keagamaan MAN 1 Surakarta yaitu penjurusan dilakukan di kelas X, wajib tinggal di madrasah dan pemberlakuan bahasa asing sebagai pengantar dalam pembelajaran. Kedua, manajemen kurikulum terdiri dari perencanaan, pelaksanaan yang berfokus pada peran guru di kelas, serta pemantauan dan evaluasi melalui supervisi kepala madrasah, sehingga melahirkan desain kurikulum yang mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketiga, adanya sistem rekrutmen yang baik, dukungan alumni, komite sekolah, dan kerjasama yang baik dari pengelola madrasah, serta sarana prasarana yang memadai menjadi faktor pendukung. Kemudian yang menjadi faktor penghambat di antaranya kebijakan nasional yang kurang mendukung, pengaruh global, kurangnya kompetensi guru, serta kurangnya dukungan

masyarakat secara luas.²¹ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai kebijakan bukan manajemen, teori kebijakan dan teori manajemen tidak bisa diartikan sama.

Ketiga, Nikmah dengan tesis “*Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Tentang Sekolah Model Pendidikan Agama Islam (Studi Implementasi di SMP N 5 Pekalongan)*”.²² Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan implementasi kebijakan, dengan empat rumusan masalah; a) Bagaimana latar belakang lahirnya kebijakan pemkot Pekalongan tentang sekolah umum model PAI. b) Bagaimana model SMP Negeri 5 Pekalongan untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah Kota Pekalongan. c) Bagaimana tingkat efektivitas kebijakan Pemkot Pekalongan di SMP Negeri 5 Pekalongan sebagai sekolah umum model PAI. d) Bagaimana factor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya kebijakan Pemkot Pekalongan didasari dengan terbitnya UU No 22 Tahun 1993 tentang pemerintah daerah yang dirubah dengan UU No 32 Tahun 2004 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan melaksanakan kebijakan yang sesuai kebutuhan daerah. Kemudian implementasi kebijakan pemerintah kota pekalongan tentang penetapan

²¹ Asykar Nurul Hidayah, *Manajemen Kurikulum Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Surakarta*, tesisi, (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2011).

²² Nikmah, *Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Tentang Sekolah Model Pendidikan Agama Islam (Studi Implementasi di SMP N 5 Pekalongan)*, (Yogyakarta: PPS Uin Sunan Kalijaga)

sekolah model pendidikan agama Islam dapat terlaksana dengan baik melalui pembentukan tim *imtaq* sebagai pelaksana aktualisasi kebijakan Walikota. Dengan tingkat efektivitas tergolong tinggi karena persentasinya mencapai 92,56 %. Sedangkan materi yang belum terlaksana 2 point atau 7,41%. Faktor pendorong implementasi terutama religiusitas masyarakat yang tinggi sehingga faktor penghambat yang berupa sekularitas sekolah negeri dapat diminimalisasi. Dalam penelitian ini tidak ditemukan pendekatan yang digunakan penulis dalam meneliti. Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terkait tema kebijakan madrasah aliyah program keagamaan di Madrasah.

E. Kerangka Teoritik

1. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga berarti administrasi pemerintah.²³ Sementara itu dalam KBBI kebijakan memiliki arti kepandaian, kemahiran, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip.²⁴

Hough yang dikutip Rahardjo menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan.²⁵ Dari penegasan tersebut diketahui

²³ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 37

²⁴ Tim penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 198.

²⁵ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 3

bahwasanya kebijakan memiliki implikasi yang besar terhadap perkembangan masyarakat.

Dalam kepemerintahan, kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program pemerintah.²⁶ Maju dan mundurnya sebuah bangsa Negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Disinilah keberanian seorang kepala Negara atau pemimpin dalam sebuah kelompok diperlukan untuk sebuah keputusan dilaksanakan atau ditinggalkan.

Istilah kebijakan pendidikan merupakan terjemahan dari dua kata bahasa Inggris *educational* dan *policy*. Kebijakan adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunjuk kepada bidangnya yaitu bidang pendidikan. Jadi kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.²⁷ Sehingga hasbullah mengatakan kebijakan pendidikan adalah seperangkat sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama.²⁸

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi, pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan

²⁶ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan Konsep, Teori Dan Model*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

²⁷ M. Hasbullah, *Kebijakan...*, hlm. 40.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.²⁹ Oleh karena itu kebijakan pendidikan berimplikasi yang sangat besar terhadap perkembangan hidup manusia dalam suatu bangsa atau Negara.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka kebijakana pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seperangkat aturan dari pemerintah yang diputuskan melalui menteri agama untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang berkeagamaan. Untuk itu kebijakan yang dikaji dalam pembahasan adalah kebijakan menteri agama yang mengatur tentang madrasah, fokusnya madrasah aliyah pada program keagamaan,

2. Teori Perumusan Kebijakan Pendidikan

Pada umumnya suatu kebijakan paling tidak dilakukan melalui dua tahap yaitu perumusan dan implementasi kebijakan. Di mana Hudsén mengelompokkan teori perumusan menjadi lima teori yaitu; teori radikal, teori advokasi, teori transaktif, teori sinoptik, dan teori incremental.

- a. Teori radikal merupakan kebebasan lembaga lokal dalam menyusun sebuah kebijakan pendidikan. Semua kebijakan pendidikan yang menyangkut penyelenggaraan dan perbaikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah diserahkan kepada daerah. Negara atau pemerintah pusat tidak turun tangan menyusun

²⁹H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 140.

sebuah rencana kebijakan pendidikan bila pada akhirnya kurang sesuai dengan kondisi lokal.³⁰

- b. Teori advokasi merupakan teori yang menganggap bahwa pemerintah pusat sangat perlu menyusun kebijakan pendidikan yang bersifat nasional demi kepentingan umum, serta demi melindungi lembaga-lembaga dan organ-organ pendidikan yang relatif masih marginal dibanding lembaga pendidikan lain yang sudah maju.³¹
- c. Teori Transaktif menyatakan bahwa perumusan kebijakan sangat perlu didiskusikan secara bersama dengan semua pihak. Proses pendiskusiannya perlu melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak terkait atau stakeholder, termasuk dalam hal ini adalah personalia lembaga pendidikan di tingkat lokal. Dan hasil dari diskusi ini disosialisasikan ke masyarakat.
- d. Teori sinoptik dimana dalam menyusun sebuah kebijakan agar menggunakan metode berfikir sistem. Objek yang dirancang dan terkena kebijakan, dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan tujuan yang sering disebut dengan misi.
- e. Teori Inkremental menekankan pada perumusan kebijakan pendidikan yang berjangka pendek serta berusaha menghindari perencanaan kebijakan yang berjangka panjang. Penekanan ini diambil karna masalah-masalah yang dihadapi serta performa dari

³⁰ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Asawaja Persindo, 2012), hlm. 99

³¹ M. Hasbullah, *Kebijakan ...*, hlm. 72

para personalia pelaksana kebijakan dan kelompok yang terkena kebijakan sulit diprediksi. Setiap saat, setiap tahun, dan setiap preode waktu mengalami perubahan yang sangat kompleks.

3. Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran (target groups), melainkan juga menyangkut factor-faktor hukum, politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program.

Teori yang digagas para ahli yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan pendidikan diantaranya:

a. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Dua ahli ini dianggap sebagai pencetus teori yang menggunakan pendekatan *the top-down approach*. Menurut kedua ahli tersebut, untuk mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna, maka dibutuhkan banyak syarat, diantaranya ialah:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksanaan tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
- 2) Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- 5) Hubungan kausalitas hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- 7) Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9) Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b. Van Meter dan Van Horn

Menurut dari Van Meter dan Van Horn, bahwa perubahan, control dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur implementasi. Kemudian ditemukan tipologi yang dibagi menjadi dua hal, yaitu: Pertama, jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan. Kedua, jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.³²

³² Arif Rohman, *Kebijakan...*, hlm. 109

c. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori yang dikembangkan oleh mereka disebut “a frame work for implementation analysis” atau kerangka analisis implementasi (KAI). Dari kerangka analisis ini digunakan dengan mengidentifikasi variable-variable yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pada keseluruhan proses implementasi. Di mana variabel-variabel tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori: 1) Mudah dan tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan. 2) Kemampuan dari keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya. 3) pengaruh langsung berbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.³³

4. Model-model Relasi Kebijakan Pendidikan

Model relasi kebijakan merupakan wujud dari implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Di mana dengan relasi ini akan diketahui peran kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan public, dan kebijakan pendidikan berdiri independen atau sejajar terhadap kebijakan publik, atau kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik.³⁴

Model ideal hubungan antara kebijakan public dan kebijakan pendidikan terdapat empat model dan hubungan positif antara keduanya.

- a. Kebijakan publik satu dengan kebijakan pendidikan
- b. Kebijakan publik tidak berkaitan dengan kebijakan pendidikan

³³ Arif Rohman, *Kebijakan ...*, hlm. 109-110.

³⁴ H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho, *Kebijakan...*, hlm. 307.

- c. Kebijakan publik tidak ditunjang oleh kebijakan pendidikan
- d. Kebijakan pendidikan tidak ditunjang oleh kebijakan kebijakan publik.³⁵

5. Madrasah Aliyah Program Keagamaan

Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berada di bawah naungan departemen agama. Madrasah berasal dari bahasa arab yang biasa digunakan untuk sekolah, artinya tempat belajar. Istilah Madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum, namun di Indonesia ditujukan untuk sekolah-sekolah Islam yang mata pelajaran dasarnya adalah mata pelajaran agama Islam.³⁶

Madrasah tumbuh dan berkembang dari bawah, dalam arti masyarakat (umat) yang didasari oleh rasa tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi penerus. Oleh karena itu, Madrasah pada waktu itu lebih ditekankan pada pendalaman ilmu-ilmu Islam. Selain itu, keberadaan Madrasah ini berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.³⁷

Madrasah di sini kemudian memiliki konotasi spesifik, di mana anak memperoleh pelajaran agama saja. Madrasah inilah yang tadinya disebut pendidikan keagamaan dalam bentuk belajar mengaji al-Qur'an, kemudian ditambah dengan pelajaran praktis, pengajaran Tauhid, Hadis, Tafsir, Tarikh Islam, dan Bahasa Arab.³⁸

³⁵ H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho, *Kebijakan ...*, hlm. 312.

³⁶ M. Ridlwan Nasir, *Mencari ...*, hlm. 280.

³⁷ Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKK*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 23.

³⁸ Muhammad Kholid Fatoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional Paradigm Baru*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 62.

Agama secara bahasa berasal dari bahasa Sansekerta³⁹ “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Artinya adalah dengan beragama maka manusia tidak akan kacau dalam kehidupannya, karena agama mengatur semua aspek kehidupan manusia. Sementara itu dalam kamus Teologi, pada dasarnya agama adalah sikap dasar manusia yang seharusnya kepada Allah, pencipta, dan penebusnya. Disini agama mengungkapkan diri dalam sembah dan bakti sepenuh hati kepada yang menciptakan manusia.⁴⁰ Selain itu agama berarti “ilmu”, “pengetahuan”.⁴¹ Agama yang berarti ilmu dan pengetahuan nampaknya sudah bergeser dari arti intelektual agama, yang mengarah kepada pelajaran Agama.⁴² Kemudian bergeser menjadi keagamaan berarti yang berhubungan dengan agama,⁴³ memiliki kekhususan dalam pengkajian pelajaran-pelajaran agama.

Berbicara pelajaran agama akan mengajak pembahasan ke istilah agama dan keagamaan. Dan jika dikaitkan dengan pelajaran akan menjadi pelajaran agama dan pelajaran keagamaan yang memiliki definisi yang berbeda. Pelajaran agama adalah pelajaran yang mengkaji mengenai agama sebagai sebuah sistem yang urgen dan mandiri. Pelajaran keagamaan adalah merujuk kepada kajian-kajian mengenai agama sebagai bagian atau aspek

³⁹Ahmad Norma Permata, *Metodologi Penelitian Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 18. Zainal Arifin Abbas, *Perkembangan Fiklan Terhadap Agama*, Cet. Ke-2 (Medan: Firma Islamiah, 1957), hlm. 19

⁴⁰Gerald O'collins dan Edward G. Farrugia, *Kamus Teologi* (Suharyo, terj), (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 17.

⁴¹L. Mardiwarsito, *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*, (Flores: Nusa Indah, 1978), hlm. 4

⁴²W. B. Sidjabat, “*Penelitian Agama: Pendekatan dari Ilmu Agama*”, dalam Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran* (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), hlm. 76.

⁴³Gerald O'collins dan Edward G. Farrugia, *Kamus ...*, hlm. 17.

dari kehidupan sosial dan budaya manusia, misalnya kajian mengenai agama dan perkembangan sosial, agama dan kehidupan ekonomi dan lain-lain.⁴⁴

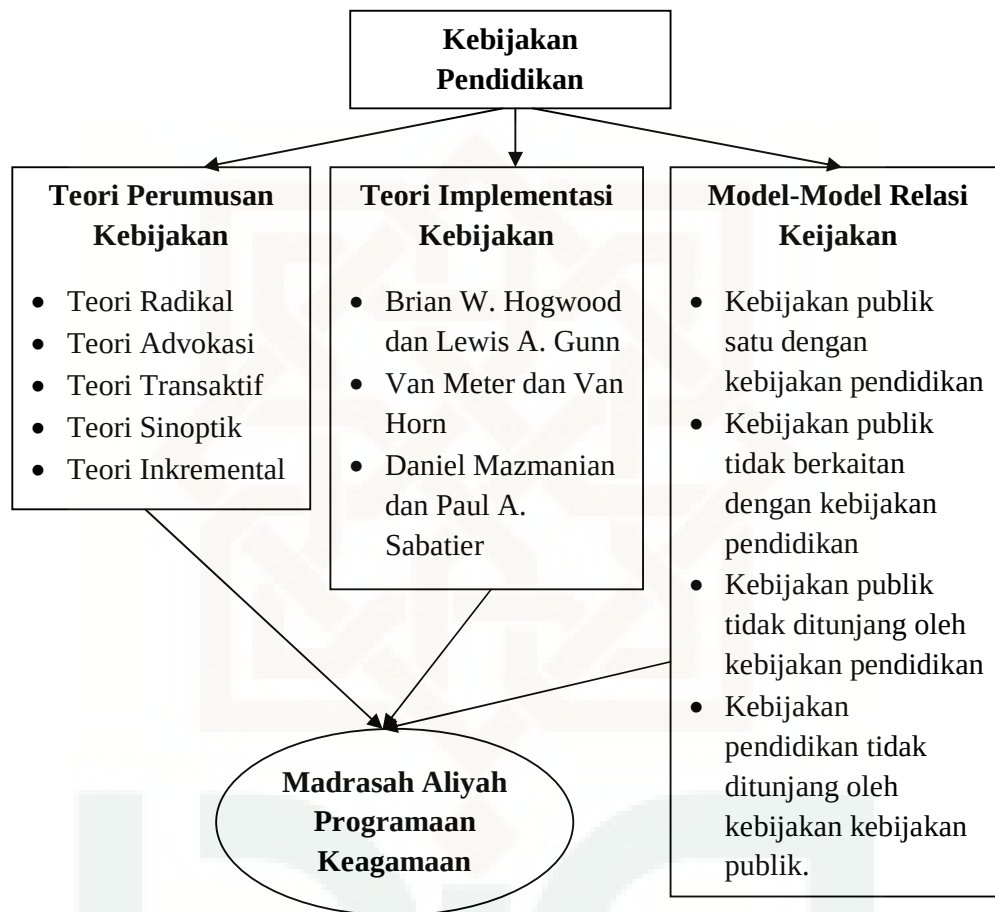
Di dalam keagamaan Islam yang berarti pengkajian pelajaran-pelajaran agama Islam yang didasari oleh al-Qur'an dan Hadis kemudian menjadi disiplin ilmu seperti Fikih, Akidah, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Yang pada akhirnya pelajaran-pelajaran agama Islam dibawa ke dalam sistem lembaga pendidikan agama, yaitu Madrasah Keagamaan.

Dengan demikian, madrasah keagamaan adalah lembaga pendidikan yang mata pelajarannya mengkaji tentang pelajaran-pelajaran agama Islam. Meliputi al-Qur'an, Hadis, Fikih, Aqidah, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan seterusnya yang berhubungan dengan agama Islam. Walaupun demikian, dalam sistem tatanan sekolah, Madrasah yang memfokuskan keagamaan adalah madrasah aliyah. Sehingga Madrasah Aliyah Program Keagamaan adalah salah satu program yang difokuskan untuk pelajaran-pelajaran keagamaan dalam sistem sekolah (Madrasah).

Dari pemaparan di atas dapat dipahami, kebijakan madrasah aliyah program keagamaan berubah terjadi melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu undang-undang, peraturan, dan keputusan tentang pendidikan keagamaan dan kemudian dikhususkan pada pendidikan keagamaan di madrasah. Dimana dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui perumusan kebijakan, implementasi kebijakan. Sehingga akan diketahui implikasi yang terjadi di madrasah (MAN

⁴⁴ Ahmad Norma Permata, *Metodologi Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 19

Yogyakarta I), sehingga penulis bisa merumuskan kepada pemerintah atau madrasah agar madrasah aliyah program keagamaan menjadi lebih baik.



F. Metode Penelitian

Dalam menyusun tesis ini penulis akan menggunakan metode penelitian kebijakan (*policy research*). Pemahaman tentang penelitian kebijakan pada awalnya merupakan kegiatan untuk membuat atau merumuskan suatu kebijakan. Penelitian kebijakan menurut Majchrzak seperti yang dikutip Riant Nugroho

adalah sebuah penelitian yang mendasar dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan berkenaan dengan masalah sosial.⁴⁵

Penelitian kebijakan mempunyai dua pemahaman, yaitu untuk merumuskan kebijakan dan untuk menilai suatu kebijakan yang sudah ada. Gordon dkk, dan Michael Hill memahami inti penelitian adalah melakukan analisis dari objek yang diteliti. Sehingga mempergunakan konsep analisis sebagai penyamaan dari penelitian.⁴⁶

Riant Nugroho memaparkan objek penelitian kebijakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penelitian tentang kebijakan dan penelitian untuk kebijakan.⁴⁷ Pada kajian ini, peneliti akan menggunakan penelitian tentang kebijakan, yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu penelitian tentang isi kebijakan (*studies of policy contents*), penelitian tentang keluaran kebijakan (*studies of policy outputs*), dan penelitian tentang proses kebijakan (*studies of policy process*).⁴⁸

Sedangkan dalam penelitian tentang kebijakan, peneliti mengkhususkan pada penelitian tentang proses kebijakan. Secara umum proses kebijakan dapat diketahui melalui pembuat kebijakan (*policy maker*) yang dipengaruhi oleh kelompok penekan dan kelompok yang berkepentingan, perumusan kebijakan (*policy formulatiao*n), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), output kebijakan (*policy output*), dampak kebijakan (*policy outcome*), dan hubungan

⁴⁵ Rian Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 99.

⁴⁶ Rian Nugroho, *Metode...*, hlm. 100.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

antara rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, *output* kebijakan, *outcome* kebijakan,⁴⁹ dan lingkungan.⁵⁰

Melihat kompleksnya masalah-masalah kebijakan, para ahli kebijakan tidak segan-segan untuk menggunakan beragam pendekatan untuk kemudian digunakan secara eklektik.⁵¹ Hal ini karna penelitian kebijakan mempunyai karakter yang khas, yaitu fokus penelitian bersifat multidimensional, orientasi penelitian bersifat empiris-induktif, menggabungkan masa depan dan sekarang, merespon hasil kebutuhan pemakaian hasil studi, menonjolkan dimensi kerja sama secara eksplisit.⁵² Oleh sebab itu penelitian kebijakan tidak ada pendekatan metodologi tunggal, sehingga peneliti kebijakan memiliki ruang yang lebih luas untuk mengikuti aneka ragam acuan metodologis.⁵³

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan objek dari penelitian dan keterbatasan peneliti, maka peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan sejarah, karna penelitian ini mengkaji kebijakan madrasah aliyah program keagamaan dari awal berdiri yaitu tahun 1987 sampai saat ini yaitu tahun 2016. Pendekatan sejarah ini penulis menggunakan pola diakronis yaitu penulisan sejarah baik yang menggunakan pola garis lurus (linier), maupun pola penggalan waktu tertentu dengan memperhatikan urutan waktu secara sistematis (kronologis).⁵⁴

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 752

⁵⁰ Lihat Dwidjowijoto dikutip oleh Riant Nugroho, *Metode...*, hlm. 102

⁵¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan; Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Public*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 42

⁵² Riant Nugroho, *Metode...*, hlm. 102

⁵³ *Ibid.*, hlm. 103.

⁵⁴ Basri, *Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan, Teori Dan Praktik)*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm. 91

Selain itu penulis memepergunakan beberapa metode-metode, yaitu metode penelitian sintesis terfokus,⁵⁵ metode analisis data sekunder,⁵⁶ metode penelitian kasus,⁵⁷ penelitian grounded.⁵⁸ Pada dasarnya pendektan penelitian di atas dapat dikelompokkan secara umum pada metode penelitian kualitatif.⁵⁹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat dipergunakan sebagai salah satu teknik analisis dalam penelitian kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik⁶⁰ dalam konteks pendidikan madrasah aliyah pada program keagamaan. Metode ini diharapkan terungkap gambaran mengenai realitas sasaran yang diteliti, yakni tentang dinamika kebijakan madrasah aliyah program keagamaan dan implikasinya di MAN Yogyakarta I, tanpa terpengaruh oleh pengukuran formalitas.

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti jelaskan sebagaimana berikut:

⁵⁵ Penelitian sintesis terfokus, merupakan pendekatan penelitian kepustakaan terpilih yang diinterpretasikan secara kritis oleh peneliti. Metode ini dilaksanakan dalam bentuk membandingkan yang diteliti dengan peroses kebijakan yang dikembangkan dalam kepustakaan kebijakan public.

⁵⁶ Analisis data sekunder, yaitu analisis terhadap data yang telah diperoleh pihak lain. Analisis data sekunder dipergunakan untuk memahami masukan kebijakan.

⁵⁷ Penelitian kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap unit sosial tertentu dengan metode penelitian yang cepat, biaya efisien, dan ada ruang yang memungkinkan bagi analisis impresionistik dari sebuah situasi.

⁵⁸ Penelitian grounded, yang dirupakan pada proses pencarian data sebanyak-banyaknya dengan tanpa berbekal hipotesis, dengan tujuan mendeskripsikan peristiwa dan memformulasikan penjelasan perihal munculnya peristiwa itu atas dasar obesvasi secara langsung.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2003), hlm. 31-37.

⁶⁰ Rian Nugroho, *Metode ...*, hlm 108.

a. Observasi⁶¹

Metode observasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan profil madrasah, sejarah, pelaksanaan MAPK. Metode ini dapat digunakan untuk memahami berbagai aspek pelaksanaan kebijakan MAPK agar memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang dinamika kebijakan MAPK. Peneliti melakukan observasi dengan melibatkan kepala madrasah, guru, tenaga administrasi, dan siswa. Pada pengamatan ini, tahap yang dilakukan merupakan pengamatan secara umum, kegiatan secara umum seperti keadaan madrasah, proses pembelajaran MAPK, dan keadaan siswa program MAPK.

b. Wawancara⁶²

Metode ini digunakan untuk mengetahui informasi lebih detail dan mendalam dari informan yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Selain itu, dengan cara ini akan dapat mengetahui persepsi/interpretasi narasumber terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dan semi terstruktur. Narasumber yang akan di wawancarai yaitu kepala sekolah baik masih menjabat atau sudah tidak menjabat, guru-guru, dan siswa.

⁶¹ Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode...*, hlm. 220.

⁶² Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm.136

c. Dokumentasi⁶³

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam catatan baik arsip yang ada di dalam madrasah, pemerintah, media cetak dan elektronik. Data-data yang akan dikumpulkan melalui metode ini yaitu tentang kebijakan MAPK yang diimplementasikan di MAN Yogyakarta I, antara lain data tentang proses pelaksanaan kebijakan MAPK meliputi visi dan misi, keadaan guru dan peserta didik, prasarana dan sarana, dan data yang berkaitan dengan penelitian.

Secara metodologi penelitian, selain metode observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti juga menggunakan metode analisis data. Dalam analisis data, peneliti akan menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman⁶⁴ yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, meliputi *reduction data*,⁶⁵ *penyajian data*,⁶⁶ dan *menarik kesimpulan (klarifikasi)*.⁶⁷

⁶³ Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, notulen rapat, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, agenda, dan sebagainya. Sutrisno Hadi, *Metode...*, hlm. 206.

⁶⁴ Metode Miles dan Huberman ini juga di kutip oleh Sugiyono dalam teknik analisis data kualitatif pada penelitian kebijakan. Sugiyono, *Metode...*, hlm. 722.

⁶⁵ Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya. Lihat dalam Matthew B. Miles & AS. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2009), hlm.16.

⁶⁶ Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, *bagan*, *grafik*, *matrik*, *network*, dan *chart*. Bila pola-

Oprasional analisis data model Miles dan Huberman dapat dijelaskan dalam mekanisme untuk menganalisis penelitian ini mengenai dinamika kebijakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan di MAN Yogyakarta I. Langkah pengumpulan data dimaksudkan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, baik yang penting maupun tidak penting, dan yang berhubungan dengan tema penelitian ini maupun. Setelah terkumpul semua data yang diperlukan maka peneliti melakukan penyajian data secara keseluruhan dan dilanjutkan dengan reduksi data dengan memilah dan memilih data yang penting untuk dianalisis. Setelah data disajikan, dan direduksi tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi.

Verifikasi peneliti gunakan dan laksanakan selama penelitian berlangsung dengan melakukan pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi⁶⁸ dan diskusi teman sejawat⁶⁹ yang didasarkan pada tingkat kepercayaan (credibility) dan tidak diragukan lagi *validitasnya*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah difahami, maka penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi tiga bagian:

pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian. *Ibid.*, hlm. 17.

⁶⁷Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁸Triangulasi yaitu teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

⁶⁹ Diskusi teman sejawat, ialah teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengespos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan teman-teman sepekerjaan. *Ibid.*, hlm. 368.

Bagian pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kasjian pustaka, kerangka teori, metedo penelitian, dan sistematika pembahsan.

Bagian kedua, berisi tentang pokok pembahasan yang disesuaikan setiap judul perbab sesuai kebutuhan dan analsisi yang dilakukan oleh penulis.

Bagian ketiga, merupakan penutup dari tesis ini yang meliputi kesimpulan dan saran konstruktif bagi pihak-pihak terkait fokus permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap dinamika kebijakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) dan implikasinya di MAN Yogyakarta I, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Kebijakan-kebijakan madrasah aliyah program keagamaan:
 - a. Undang-Undang
 - 1) Undang-Undang No. 4 tahun 1950
 - 2) Undang-Undang No. 2 tahun 1989
 - 3) Undang-Undang No. 20 tahun 2003
 - b. Peraturan Pemerintah
 - 1) Peraturan pemerintah No. 29 tahun 1990.
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992.
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007.
 - c. Permendiknas
 - 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 69 tahun 2013.
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 81A tahun 2013
 - d. Peraturan Menteri Agama
 - 1) Peraturan Menteri Agam No. 2 tahun 2008.
 - 2) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1960.

- 3) Peraturan Menteri Agama No. 90 tahun 2013.
- 4) Peraturan Menteri Agama No. 912 tahun 2013.
- e. Keputusan Menteri Agama
 - 1) Keputusan Menteri Agama No. 42 tahun 1988.
 - 2) Keputusan Menteri Agama No. 165 tahun 2014.
 - 3) Keputusan Menteri Agama No. 370 tahun 1993
 - 4) Keputusan Menteri Agama No. 371 tahun 1993.
 - 5) Keputusan Menteri Agama No. 374 tahun 1993.
- f. Keputusan bersama
 - 1) Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri, No. 6 tahun 1975.
 - 2) Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 0299 tahun 1984 atau No. 45 tahun 1984.
2. Dinamika kebijakan madrasah aliyah program keagamaan berawal dari Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) pada tahun 1987 yang memiliki nilai kesuksesan yang tinggi yang menjadikan lulusannya mampu menembus universitas-universitas luar negeri. Setelah adanya pergantian menteri serta dorongan dari masyarakat untuk memperbanyak lembaga MAPK, akhirnya pada tahun 1993 menteri agama membuka madrasah aliyah keagamaan (MAK) yang memberi kebebasan kepada semua lembaga yang memenuhi syarat untuk membuka MAK. Jumlah yang semakin masif berakibat pada semakin menurunnya control dari pemerintah, hingga

menjadikan beberapa madrasah undur diri dari penyelenggaraan MAK. Pada tahun 2008 MAK tidak diperkenankan menerima siswa baru sebagai gantinya madrasah dipersilahkan membuka program keagamaan seperti IPA dan IPS. Kemudian pada tahun 2013 program keagamaan dirubah menjadi program peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan.

3. Implikasi dinamika kebijakan madrasah aliyah program keagamaan di MAN Yogyakarta I, berdampak pada kualitas input (siswa) yang menurun sehingga berakibat pada nilai-nilai pelajaran siswa yang menurun, dan berakibat pula menurunnya peminat peserta didik untuk masuk ke program keagamaan. Menurunnya kualitas siswa menjadikan kultur sosial keagamaan yang semakin sulit diatur, menjadikan guru mengikuti apa yang dikehendaki siswa bukan siswa mengikuti arahan dari guru.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis memberi saran kepada pemerintah dan lembaga-lembaga madrasah yang masih mempertahankan madrasah keagamaan, sebagaimana berikut:

1. Untuk memposisikan Madrasah Aliyah Program Keagamaan pemerintah harus secara jelas mengatur landasan yuridis tentang madrasah keagamaan, agar pendidikan keagamaan memiliki kedudukan yang jelas sebagai bagian dari madrasah.
2. Untuk meningkatkan mutu Madrasah Aliyah Program Keagamaan pemerintah semestinya memaksimalkan SDM yang ada pada lembaga madrasah agar mutu peserta didik tetap terjaga. Serta memanfaatkan

sarana prasaran seperti asrama untuk mengasah kemampuan akademik peserta didik terutama ilmu-ilmu keagamaan yang didukung bahasa Arab dan Inggris.

3. Untuk pendidik sebagai aspek yang mendukung keberhasilan peserta didik dalam belajar, semestinya lebih atraktif dalam mengawal proses pembelajaran. Sehingga motivasi dan semangat peserta didik dalam belajar selalu terjaga, dan menghasilkan lulusan yang memuaskan.
4. Untuk Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta I semestinya tidak gentar dengan berbagai perubahan kebijakan dari pemerintah. Tetapi seharusnya MAN Yogyakarta I memanfaatkan sumberdaya pendidik yang telah teruji untuk meningkatkan kemampuan peserta didik menjadi lebih percaya diri terhadap kemampuan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Zainal Arifin, *Perkembangan Fiklan Terhadap Agama, Cet. Ke-2* Medan: Firma Islamiah, 1957.
- Abdurrahman, Dudung, *Metodelogi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- AG, Muhaimin, dkk, *Revitalisasi Madrasah*, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006.
- Aini, Nur, *Eksistensi MAPK dan Pengelolaannya Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Kasus Di MAN 1 Surakarta)*, Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Alwi, Adit dan Aksp, Zainal, *Elit dan Modernisai*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Arifin, M, *Kapeta Selekt Pendidikan; Islam Dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarata: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Asrohah, Hanum, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Assegaf, Abd. Ranchman, *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Azra, Azumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Melenium III*, Jakarta: Kencana, 2012.
- _____, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1998.
- Basri, Hasan, *Fislasafat Pendidikan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

- Basuki dan Ulum, M. Mifftahul, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ground Offset, 2007.
- Basuni, Firdaus, *Revitalisasi Madrasah Membangaun Umat Terdidik Yang Visioner*, Bogor: Percetakan Grafika Mardi Yuana, 2010.
- Darmaningtiyas dan Subkhan, Edi, *Manipulasi Kebijakan Pendidikan*, Resist Book, 2012.
- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Departemen Agama RI, *Desain Pengembangan Madrasah*, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005.
- _____, *Isu-Isu Sekitar Madrasah*, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2006.
- _____, *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*, Jakarta: INIS, 1998.
- Djamaluddin dan Aly, Abdullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKK*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Dwiningrum, Siti Irene Astute, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2011.
- Fatoni, Muhammad Kholid, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional Paradigm Baru*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hasbullah, *Kapeta Slekta Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasbullah, M., *Kebijakan Pendidikan Dalam Persepektif Teori, Aplikasi Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

- Hidayah, Asykar Nurul, *Manajemen Kurikulum Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Surakarta*, Tesis, Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2011
- Hidayah, Asykur Nurul, *Manajemen Kurikulum Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Surakarta*, Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Irianto, Yoyon Bahtiar, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan Konsep, Teori Dan Model*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Maksum, *Madrasah, Sejarah Dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mardiarsito, L, *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*, Flores: Nusa Indah, 1978.
- Miles, Matthew B. & Huberman, AS. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2009.
- Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum, Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2010.
- Mustajab, *Pola Pengembangan Madrasah Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kebijakan Pada Kanwil Kemenag Bidang Mapeda Provinsi Yogyakarta Dan Implementasinya Di Ma Wilayah Kota Yogyakarta)*, Yogyakarta: PPS Uin Sunan Kalijaga. 2012.
- Nasir, M. Ridlwan, *Mencari Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nikmah, *Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Tentang Sekolah Model Pendidikan Agama Islam (Studi Implementasi di SMP N 5 Pekalongan)*, Yogyakarta: PPS Uin Sunan Kalijaga.

- Nizar, Samsul, *Sejarah Social dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, (Jakarta: Kencana , 2013).
- Nugroho D, Riant, *Kebijakan Public Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputiondo, 2003.
- O'collins, Gerald dan Farrugia, Edward G, *Kamus Teologi* (Suharyo, terj), Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Permata, Ahmad Norma, *Metodologi Penelitian Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Pranoto, Suhartono W, *Teori Dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahardjo, Mudjia, *Pemikiran Kebijakan Penidikan Kotemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Rahma, Awalia, "Reformasi Pendidikan Islam Munawir Sjadzali", dalam; *Pemikiran Pendidikan Islam Biografi Social Intelektual*, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Badan Litbang Dan Diktat Kementerian Agama RI, 2010.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Kelasik Sampai Pereembangan Mutakhir Teori Sosila Postmodern*, Terj. Nurhadi, Bantul: Kreasi Wacana, 2010
- Rohman, Arif, *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi Dan Implementasi*, Yogyakarta: Asawaja Perssindo, 2012.
- Saifuddin, Ahmad, "Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan", dalam, *Jurnal: Pendidikan Agama Islam*, Volume 03, Nomor 01, Mei 2015.
- Saridjo, Marwan, dkk, *Mereka Bicara Pendidikan Islam Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sarijdjo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: CV. Amisco.

Shaleh, Abdul Ranchman, *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi Dan Aksi*, Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2004.

——— *Pendidikan Agama Dan Keagamaan: Visi Misi Dan Aksi*, Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000.

Sidjabat, W. B, “Penelitian Agama: Pendekatan dari Ilmu Agama”, dalam Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.

Sirozi, Muhamad, *Politik Pendidikan di Indonesia; Person Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*, Jakarta: INIS, 2004.

Sjadzali, Munawir, *Islam Realitas Baru Dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: UI-Press, 1993

Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2010.

Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press.

Subhan, Arief, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antar Modernisasi Dan Identitas*, Jakarta: Uin Jakarta Press, 2009.

Suharto Edi, *Kebijakan Social Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Rosda Karya, 2011

Suryanegara, Ahamad Mansur, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.

Tarmizi Taher, “Peran Agama Dalam Kesehatan Jiwa Masyarakat Modern”, Dalam; *Kumpulan Makalah Penunjang Symposium Nasional Cendekiawan Muslim Tentang Membangun Masyarakat Indonesia Abad Xxi*, ICMS: 1994.

Tilaar, H.A.R. dan Nugroho, Rian, *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Public*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Tim penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Toto Suharto, *Pendidikan Islam Kritis Menuju Rehumanisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Hidayah, 2014.

Truna, Dody S, "Islam dan Politik Orde Baru di Indonesia 1966-1990", Dalam, *Pranata Islam Di Indonesia Pergulatan Social Politik Hukum Dan Pendidikan*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002.

Wahid, Abdurrahman, "Pendidikan di Indonesia Antara Elitism dan Populisme", dalam, "*Quo Vadis Pendidikan Islam Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Social Dan Keagamaan*", Malang: UIN Malang Press, 20016.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Mutiara.

Zainal Abidin Ahmad, *Memperkembang Dan Mempertahankan Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

JURNAL

Faridah Alawiyah, "Kesiapan Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013", dalam. *Info singkat kesejahtraan social*, volume VI, No. 15/i/P3DI/Agustus/2014.

Imam Machali, "Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 Dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045", dalam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume III, Nomor 1, Juni 2014.

Irham, "Pesantren dan Perkembangan Politik Pendidikan Agama di Indonesia", *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*

M. Ilham F. Putuhena, "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif", dalam; *Jurnal rechtsvinding*, Vol. 2, No. 3, Desember 2013.

Rangga Satria, "Politik Pendidikan Islam Studi Kebijakan Orde Baru Terhadap Madrasah", Dalam, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 10, No. 1,

Januari 2014.

Ruwiah Abdullah Buhungo, “Implementasi Dan Pengembangan Kurikulum 2013 Pada Madrasah Aliyah”, dalam *Tadbir, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, volume 3, nomor 1, Februari 2015.

Supa’at, “Transformasi Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional”, *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, STAIN Kudus, Nomor 1, Tahun 15, 2011.

WEB

<https://murtadhoui.wordpress.com/2014/08/22/25/>. Diakses 22 September 2016.

<http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/840-posting-readres-trukturisasi-mak>. Diakses 23 September 2016.

<http://madrasah.kemenag.go.id/berita/563/tahun-ini-kemenag-revitalisasi-man-pk.html>. Diakses 05 oktober 2016.

http://www.mansatujember.sch.id/sejarah_man1/. Diakses 1 September 2016.

Landasan Hukum

Undang-Undang No. 2 tahun 1989,

Undang-Undang No. 20 tahun 2003,

Undang-Undang No. 4 tahun 1950,

Landasan Hukum

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama, No. 17678/kab, tanggal 16 Juli tahun 1951 (Pendidikan) dan No. K/1/9180.

Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2008.

Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1960.

Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2008.

Peraturan Menteri Agama No. 90 tahun 2013.

Peraturan Menteri Agama No. 90 tahun 2013.

Peraturan Menteri Agama No. 912 tahun 2013.

Peraturan Menteri Agama No. 912 tahun 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 69 tahun 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 81A tahun 2013.

Peraturan pemerintah No. 29 tahun 1990.

Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990.

Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990.

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992.

Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007.

Landasan Hukum

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri, No. 6 tahun 1975.

Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 0299 tahun 1984 atau No. 45 tahun 1984.

Keputusan Menteri Agama No. 42 tahun 1988.

Keputusan Menteri Agama No. 165 tahun 2014.

Keputusan Menteri Agama No. 165 tahun 2014.

Keputusan Menteri Agama No. 370 tahun 1993

Keputusan Menteri Agama No. 371 tahun 1993.

Keputusan Menteri Agama No. 374 tahun 1993.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

Nama : Nurhadi Yasin
TTL : Tanjung Makmur, 06 November 1991.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kampung Durian Api, des. Durian Seribu, kec. Silaut, kab. Pesisir Selatan, Sumatra Barat.
Email : nurhadi.elfad@gmail.com
Nama Ayah : Baidi
Nama Ibu : Siti Asiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal

- a. SD : SDN
- b. SMP : MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo
- c. SMA : MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo
- d. Perguruan Tinggi : Jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN), PONOROGO (2014)